

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu secara sadar dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginannya dalam pola hidup yang memuaskan (Rahman et al., 2022). Pendidikan disebut juga sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru, meningkatkan martabat diri, dan mencerdaskan pemikiran, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan (Sitorus et al., 2024). Pendidikan secara singkat ditujukan untuk memanusiaikan manusia. Dalam hal ini, pendidikan diartikan sebagai upaya individu untuk mewujudkan kesempurnaan hidupnya (Suryana & Muhtar, 2022).

Proses pendidikan dapat dilakukan di manapun dan kapan pun, salah satu jalur yang dapat ditempuh yaitu melalui pendidikan formal. Salah satu jenjang pada pendidikan formal yaitu pendidikan menengah, lebih spesifiknya Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tercantum dalam UU RI No. 23 Tahun 2003. Salah satu tujuan pendidikan jenjang SMA yaitu mengembangkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya (Wibowo & Pranoto, 2023).

Sekolah tidak hanya menjadi tempat pendidikan yang mengajarkan pengetahuan bersifat kognitif dan psikomotor, namun juga harus melalui pembentukan sikap dan kepribadiannya, atau disebut juga dengan pendidikan karakter (Atmaja, Dewantara, & Utomo, 2020; Suryana & Muhtar, 2022). Lingkungan sekolah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan perlu mendukung dan mengajarkan pendidikan karakter sebagai langkah dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (Sutrisno & Zuchdi, 2023).

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk membantu individu sehingga ia dapat memahami dan menerapkan sikap serta perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya (Lickona, 2013; Ali, 2018). Pendidikan karakter dianggap mampu untuk mencegah dan mengatasi

fenomena globalisasi yang mengakibatkan berbagai permasalahan di dunia, salah satunya yaitu dekadensi nilai-nilai moral di suatu bangsa (Pamungkas, Sumaryoto, & Sriyono, 2024).

Menurut Permendikbud RI No. 20 Tahun 2018, pendidikan karakter lebih dikenal dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter salah satunya mengenai toleransi. Nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam kurikulum 2013, kemudian diringkas menjadi 5 nilai utama, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas (Pamungkas, Sumaryoto, & Sriyono, 2024). Nilai-nilai dalam PPK ini kemudian menjadi awal perumusan dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila (Aini et al., 2024).

Karakter toleransi akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Dimensi pada profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan nilai toleransi terdapat pada dimensi berkebhinekaan global (Az-Zahra, Hidayah, & Wahyuni, 2024; Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022). Toleransi merupakan salah satu nilai moral yang sebaiknya diajarkan oleh sekolah (Lickona, 2013). Singkatnya, toleransi merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada (Amirudin et al., 2022). Toleransi dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan pluralitas terhadap perbedaan yang ada di Indonesia (Khairiyah, Babo, & Muhajir, 2022; Faqih, 2019).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman seperti agama, ras, suku, dan budaya (Zilfia et al., 2024). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang menerima dan merangkul berbagai perbedaan yang ada. Banyaknya kasus mengenai intoleransi menunjukkan bahwa penerapan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, yang biasanya terjadi karena diskriminasi oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas (Nurhakim, Adriansyah, & Dewi, 2024).

Intoleransi merupakan lawan kata dari toleransi, yaitu ketidakmampuan individu untuk memahami, menghargai, dan menerima perbedaan orang lain,

sehingga ada sikap suka mencampuri kepentingan orang lain dengan tidak menyukai, menentang, bahkan menggangu (Kamaluddin, Sari, & Anggraini, 2021). Intoleransi terhadap perbedaan dinilai oleh guru sebagai penyimpangan moral serius yang menjadi awal dari berbagai macam bentuk kebencian, prasangka, dan kekerasan yang bersifat destruktif dalam kehidupan bermasyarakat (Lickona, 2018).

Dalam sistem pendidikan Indonesia, Kemdikbudristek dalam laman resminya menyatakan bahwa terdapat tantangan yang besar dengan adanya “tiga dosa besar pendidikan”, salah satunya yaitu intoleransi. Intoleransi dapat berakibat buruk yaitu menghambat proses belajar peserta didik (Hidayah et al., 2022). Selain itu, intoleransi peserta didik juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus tindak kekerasan hingga bunuh diri pada anak-anak (Burhan, 2011).

SETARA Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan survei terhadap toleransi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak dua kali pada tahun 2016 dan 2023. Survei pertama dilaksanakan pada tanggal 4-16 April 2016, dengan jumlah responden 760 siswa di SMA Negeri Jakarta dan Bandung Raya, menyatakan bahwa terdapat (61,6%) siswa yang toleran, (35,7%) yang intoleran pasif, (2,4%) yang intoleran aktif dan (0,3%) terpapar (Hasani, 2016).

Sementara itu, pada survei kedua yang dilaksanakan pada Januari-Maret 2023 dengan jumlah responden sebanyak 947 siswa di SMA yang terletak di 5 kota yaitu Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Hasil survei menyatakan bahwa terdapat (70,2%) siswa yang toleran, (24,2%) yang intoleran pasif, (5%) yang intoleran aktif, dan (0,6%) yang berpotensi menjadi terpapar (Hasani, 2023).

Jika dibandingkan hasil survei 2016 dan 2023, terlihat adanya kecenderungan positif pada sikap toleran yang mengalami kenaikan dari 61,6% menjadi 70,2%. Selain itu, terjadi penurunan angka pada kelompok intoleran pasif dari 35,7% menjadi 22,4%. Namun, sebagian siswa pada kategori intoleran aktif mengalami peningkatan dari 2,4% hingga 5%. Selain itu, pada

kategori terpapar juga mengalami peningkatan dari 0,3% menjadi 0,6% (Hasani, 2023).

Berdasarkan hasil survei di atas, meskipun tingkat sikap toleransi siswa SMA memiliki kecenderungan yang baik, namun tiga kategori lainnya yaitu intoleran pasif, intoleran aktif, dan terpapar masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, terutama jenjang menengah.

Salah satu sekolah menengah yang menjadi fokus peneliti untuk melakukan penelitian yaitu SMAN 99 Jakarta yang terletak di kota Jakarta Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua guru BK dan perwakilan siswa SMAN 99 Jakarta masing-masing dari jenjang kelas yang berbeda, SMAN 99 Jakarta merupakan sekolah yang menerapkan pendidikan karakter salah satunya yaitu toleransi. Pendidikan karakter toleransi diajarkan melalui tiga hal, yaitu budaya sekolah, mata pelajaran terkait, dan diajarkan oleh Guru BK sebagai konselor sekolah.

Budaya sekolah yang dilakukan seperti perayaan hari-hari besar keagamaan, budaya 5S setiap paginya, dan kegiatan peribadatan setiap hari Jumat seperti agama Islam tadarus, Katolik dan Kristen kebaktian, dan ada bimbingan untuk Hindu dan Budha. Kemudian, mata pelajaran yang mengajarkan toleransi yaitu PPKn, sosiologi, dan Agama. Selain itu, Guru BK juga berperan dalam mengajarkan karakter toleransi siswa. Guru BK menyisipkan pendidikan toleransi melalui pengingat kecil (*little reminder*) ketika memulai dan menutup kelas. Belum terdapat layanan BK yang diimplementasikan untuk menerapkan pendidikan karakter toleransi. Guru BK maupun peserta didik menyatakan masih membutuhkan pembahasan secara rinci mengenai toleransi melalui format layanan BK.

Karakter toleransi di lingkup sekolah secara luas, dapat dikatakan sangat baik. Namun, Guru BK dan peserta didik menyatakan bahwa masih terdapat beberapa bentuk intoleransi di kalangan siswa, terutama pada peserta didik kelas XI. Berdasarkan studi pendahuluan I, diperoleh data beberapa bentuk intoleransinya yaitu:

1. Candaan mengenai agama dan etnis yang berlebihan.

2. Ejekan fisik kepada yang berkebutuhan khusus.
3. Stereotip/prasangka terhadap etnis tertentu.
4. Mengabaikan teman yang sedang berbicara di depan kelas.
5. Perbedaan pendapat antara kelompok dominan dan pasif yang menimbulkan konflik berupa perang dingin yang ditandai dengan terbentuknya sirkel pertemanan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya permasalahan intoleransi di SMAN 99 Jakarta, maka diperlukan adanya pendidikan karakter toleransi. Terdapat hal dominan yang terjadi yaitu mengenai perbedaan pendapat yang berujung menjadi sebuah konflik. Oleh karenanya, secara spesifik macam toleransi yang akan diintervensi yaitu toleransi terhadap ketidaksepakatan atau dikenal dengan *Tolerance for Disagreement* (TfD) (Teven, McCroskey, & Richmond, 1998; Richmond & McCroskey, 2010).

Permasalahan mengenai ketidaksepakatan pada peserta didik diperkuat dengan adanya data berdasarkan studi pendahuluan II, yaitu:

1. Ketidaksepakatan karier, mengenai perbedaan pilihan jurusan perkuliahan antara orang tua dan siswa.
2. Ketidaksepakatan mengenai isu-isu politik, contohnya seperti pemilihan presiden (yang sudah terjadi), dan pemilihan gubernur (yang sedang berlangsung).
3. Ketidaksepakatan yang terjadi pada kerja kelompok, yang meliputi:
 - a. Mekanisme pembentukan kelompok, siswa sering kali berdebat mengenai cara pembagian kelompok seperti secara acak (spin), memilih sendiri, dan dipilhkan oleh guru berdasarkan nomor absen dan hitungan angka tertentu. Di dalam kelas, terdapat sirkel pertemanan yang selalu ingin berada dalam satu kelompok, sehingga metode acak dinilai lebih adil. Meskipun begitu, ketidaksepakatan tetap terjadi dikarenakan tidak adanya sistem yang melakukan pemerataan terhadap siswa yang aktif dan pasif. Siswa yang pasif kebanyakan paling banyak dihindari, lebih spesifik mengarah kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dianggap menyulitkan jika harus satu kelompok dengannya. Akibat yang ditimbulkan yaitu penumpukan tugas pada siswa tertentu, dan

memiliki kecenderungan untuk tidak menyukai siswa yang pasif tersebut.

- b. Konteks Penugasan, hal yang menjadi ketidaksepakatan biasanya mengenai pembagian tugas, waktu pengerjaan (jika harus diselesaikan bersama kelompok: misalnya drama), dan perbedaan pendapat mengenai isi tugas yang harus diselesaikan secara diskusi kelompok.

Dengan demikian, toleransi terhadap ketidaksepakatan perlu untuk diperhatikan karena dampak buruk yang sudah terjadi pada lingkup peserta didik kelas XI di SMAN 99 Jakarta. Penelitian Miloloža et al. (2014) pada 147 mahasiswa mengungkapkan masih terdapat mahasiswa dengan Tfd rendah, yaitu sebanyak 2,2% dan mayoritas berada pada kategori sedang sebanyak 60,9%. Selanjutnya, penelitian Tolliver et al. (2020) juga menyatakan terdapat skor rata-rata rendah dari total 24 kelompok sampel anggota Gereja dengan skor rata-rata 32. Hal ini menunjukkan pentingnya terlebih dahulu untuk mengetahui profil toleransi terhadap ketidaksepakatan peserta didik. Kemudian, perlu adanya intervensi jika kondisi yang ada di lokasi penelitian mengkhawatirkan, atau profil Tfd peserta didik masih ada pada tingkat rendah dan sedang.

Martinson mempertegas, bahwa Tfd perlu dibahas dalam setting pendidikan karena termasuk suatu pembelajaran sosial yang perlu dipelajari guna melatih siswa untuk menghargai perbedaan pendapat, berpikir kritis, dan terlibat dalam dialog yang sehat dan konstruktif (Martinson, 2005). Selain itu, kondisi mengkhawatirkan digambarkan oleh Russo dan Vanagt (2023) bahwa tingkat toleransi terhadap ketidaksepakatan yang rendah mengakibatkan adanya konflik interpersonal yang tidak dapat ditangani. Dampak lainnya disebutkan oleh Mortensen, seperti sikap menghindari satu sama lain, adanya perang dingin, dan perasaan gengsi yang berkepanjangan (Mortensen, 2006).

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, akan diintervensi melalui layanan BK yang tersedia di lingkungan sekolah untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di kalangan peserta didik (Ulfiah & Jamaluddin, 2022), seperti membantu mengatasi konflik dan perbedaan, serta mendorong toleransi dan empati (Wibowo & Pranoto, 2023). Bimbingan dan konseling memiliki peran sebagai bagian integral dari pendidikan karakter (Habsy, Adrianti, &

Fauziah R, 2023). Dalam hal ini, Guru BK sebagai pelaksana layanan BK memiliki peran penting untuk menguatkan karakter siswa melalui layanan BK yang tersedia (Sari, 2023; Oktaviani & Syawaluddin, 2023; Seprianto, Hartini, & Rizal, 2024).

Ketika memberikan pendidikan karakter, tentunya konselor sekolah perlu memiliki kapabilitas yang menunjang dalam pembelajaran. Guru BK sebagai konselor sekolah harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan materi dan strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dan tujuan sekolah (American School Counselor Association, 2012). Berkenaan dengan karakter toleransi, ASCA menegaskan bahwa program BK di sekolah perlu memfasilitasi perkembangan pribadi/sosial siswa, salah satunya memperoleh keterampilan interpersonal, bentuknya yaitu mengakui, menerima, menghormati dan menghargai perbedaan individu, keberagaman suku, dan budaya (American School Counselor Association, 2004).

Dalam pendidikan karakter toleransi, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, salah satunya yaitu kelompok (Sodik, 2020). Peneliti akan melaksanakan salah satu layanan BK yang dapat digunakan untuk pendidikan karakter toleransi, yaitu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok berupa bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dalam suasana kelompok guna mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah suatu masalah atau dalam upaya mengembangkan kehidupan pribadinya (Prayitno & Amti, 2018; Rusmana, 2009).

Topik tugas akan dibahas dalam bimbingan kelompok pada penelitian ini, mengenai masalah toleransi terhadap ketidaksepakatan. Bimbingan kelompok mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang termasuk ke dalam bidang pribadi dan sosial, hal ini dipertegas oleh Yusuf dan Nurihsan bahwa bimbingan sosial-pribadi merupakan bimbingan untuk membantu pada individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi seperti yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal atau dengan teman sebaya, dan penyelesaian konflik (Yusuf & Nurihsan, 2010).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok, yaitu: ekspositori, diskusi kelompok, teknik pemecahan *problem-*

solving, bermain peran (*role playing*) yang terdiri dari sosiodrama dan psikodrama, permainan simulasi, karyawisata, dan *homeroom* (Romlah, 2019). Pada layanan bimbingan kelompok dengan topik toleransi, berbagai metode yang digunakan dalam beberapa penelitian yang relevan yaitu: 1) metode diskusi kelompok (Maharani, Widiastuti, & Andriyanto, 2020; Fitriyana, 2020), 2) *role playing* atau bermain peran (Hanim, Badrujaman, & Pratiwi, 2017); 3) sosiodrama (Mulyani & Mentari, 2018; Cahyono, Pribadi, & Suriata, 2018); 4) teknik permainan monopoli (Budiarti, Saputra, & Handayani, 2022); dan 5) teknik permainan simulasi menggunakan UNO (Pabbajah, Murtiningsih, & Budiono, 2022).

Peneliti akan menggunakan metode sosiodrama, metode ini sangat sesuai digunakan untuk meningkatkan perkembangan sosial remaja dalam *setting* layanan bimbingan kelompok (Winkel, 1991). Selain itu, sosiodrama dipilih dengan tujuan agar siswa mampu memahami topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok dengan mudah (Nurharnanik, 2022), menarik dan tidak membosankan (Faqih, 2019), sehingga akan meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sosiodrama dilakukan dengan memerankan suatu peran tertentu dari situasi masalah sosial untuk membantu memecahkan masalah siswa (Tohirin, 2015).

Dalam topik toleransi, memang sudah diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran berdasarkan hasil wawancara, salah satunya yaitu PPKn. Namun, hanya membahas secara teoritis dan menekankan aspek kognitif sehingga kurang menyentuh aspek afektif yang memberikan pengalaman secara langsung (Burhan, 2011). Metode sosiodrama dapat mengatasi permasalahan tersebut, karena sosiodrama memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa dengan mendramatisasikan suatu masalah sosial yang terjadi di sekitarnya agar siswa memahami dan melatih diri untuk memecahkan masalah sosial tersebut (Sanjaya, 2016).

Sosiodrama merupakan metode yang efektif digunakan untuk meningkatkan toleransi peserta didik dalam jenjang yang berbeda. Terdapat beberapa penelitian yang relevan, pertama pada pembelajaran toleransi mata pelajaran PPKn kelas 6 SD, metode sosiodrama dinilai berhasil meningkatkan

pemahaman siswa terhadap pentingnya toleransi serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (Amelia et al., 2021). Selain itu, pada mata pelajaran IPS kelas IV oleh Khairiyah, Babo, dan Muhajir (2022), sosiodrama merupakan metode yang lebih baik daripada metode ceramah dan tanya jawab.

Lebih eksplisit, dalam *setting* layanan bimbingan kelompok dengan topik toleransi, terdapat penelitian yang relevan dan membuktikan bahwa metode sosiodrama cocok untuk digunakan. Pada penelitian Hanim, Badrujaman dan Pratiwi (2017) menggunakan *role playing* terhadap siswa kelas X SMK, hasilnya bahwa *role playing* dinilai berpengaruh terhadap toleransi siswa dan mampu menjadi alternatif penanganan yang dapat digunakan untuk meningkatkan toleransi siswa. Selanjutnya, Mulyani dan Mentari (2018) dengan subjek kelas XI SMK, menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama mampu berpengaruh terhadap pembentukan karakter toleransi siswa. Terakhir, penelitian oleh Cahyono, Pribadi dan Suriata (2018) pada siswa SD, menunjukkan bahwa metode sosiodrama dapat menarik minat dan antusiasme siswa dalam mengikuti bimbingan kelompok.

Berdasarkan uraian atas, fenomena intoleransi di kalangan siswa masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya sikap dan perilaku intoleransi yang ditunjukkan pada peserta didik terutama kelas XI di SMAN 99 Jakarta, lebih spesifiknya mengarah kepada masalah toleransi terhadap ketidaksepakatan. Belum ada pembahasan yang lebih komprehensif melalui format BK terhadap pendidikan karakter toleransi di SMAN 99 Jakarta, dan adanya keinginan dari Guru BK maupun peserta didik untuk membahas karakter toleransi. Sehingga dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok dengan Metode Sosiodrama terhadap Toleransi terhadap Ketidaksepakatan pada Peserta Didik Kelas XI di SMAN 99 Jakarta.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana gambaran toleransi terhadap ketidaksepakatan peserta didik kelas XI di SMAN 99 Jakarta sebelum adanya perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan metode sosiodrama?
2. Bagaimana gambaran toleransi terhadap ketidaksepakatan peserta didik kelas XI di SMAN 99 Jakarta setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan metode sosiodrama?
3. Apakah kegiatan bimbingan kelompok dengan metode sosiodrama dapat berpengaruh terhadap toleransi terhadap ketidaksepakatan peserta didik kelas XI di SMAN 99 Jakarta?

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan mengenai pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan metode sosiodrama terhadap toleransi terhadap ketidaksepakatan pada peserta didik kelas XI di SMAN 99 Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan metode sosiodrama terhadap toleransi terhadap ketidaksepakatan pada peserta didik kelas XI di SMAN 99 Jakarta?”

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara lebih rinci, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan keilmuan dan kepustakaan, khususnya yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling dalam kajian mengenai layanan bimbingan kelompok, metode pembelajaran sosiodrama, dan toleransi terhadap ketidaksepakatan.

2. Kegunaan Praktis

a. Guru Bimbingan dan Konseling

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau alternatif pilihan bagi guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan

toleransi terhadap ketidaksepakatan peserta didik melalui format layanan bimbingan dan konseling.

b. Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap toleransi terhadap ketidaksepakatan peserta didik sehingga urgensi dari sikap dan perilaku toleransi mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari guna meminimalisir adanya intoleransi di kalangan siswa. Selain itu, dengan penerapan sosiodrama, diharapkan peserta didik lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode yang digunakan oleh pendidik, terutama Guru BK dalam format layanan BK.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperluas untuk melakukan penelitian serupa atau melakukan intervensi pada penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dalam penelitian ini untuk mengembangkan program ataupun media yang mendukung pembentukan karakter toleransi bagi peserta didik, terutama dalam toleransi terhadap ketidaksepakatan.

Intelligentia - Dignitas